

Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru)

Rio Tutrianto

Universitas Indonesia

rio.tutrianto@yahoo.co.id

Abstrak

Perubahan dan perkembangan kota tidak luput dari eksistensi konflik, yang pada gilirannya pastinya bisa mengarah pada lahirnya kejahatan di daerah perkotaan, itu juga bisa ditemukan di Kota Pekanbaru. Tingginya jumlah kejahatan di suatu wilayah, jumlah jenis kejahatan tertentu yang terjadi pada sekelompok orang tertentu, adalah semakin banyak fenomena dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian semi-etnografi dalam mengumpulkan data penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksamaan struktural yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Banyaknya arena budaya yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan kesuksesannya tetapi cara untuk merayakan kesuksesan tidak sama tersedia di kota telah menyebabkan ketidakpercayaan cara yang dilembagakan dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan budaya, kemudian melakukan kejahatan sebagai entitas merupakan alternatif untuk memuaskan keinginan untuk mencapai budaya tujuan. Munculnya wilayah kejahatan adalah bentuk penyesuaian yang dibuat oleh individu dalam masyarakat yang berada di daerah perkotaan dikarenakan ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan kesempatan menggunakan cara-cara kelembagaan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk model adaptasi Inovasi. Penyesuaian seperti itu terjadi sebagai akibat dari konflik mental yang dialami ketika ada kewajiban untuk mengikuti cara yang dilembagakan untuk mencapai tujuan dengan tekanan untuk menggunakan cara tidak sah dalam mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: Kriminologi, Wilayah Kejahatan, Kota, Pekanbaru

Pendahuluan

Selama dekade pertama tahun 1990-an, kota menjadi fitur dominan sebagai sasaran kajian atau riset kriminologi. Muncul gerakan yang beranggapan bahwa tatanan sosial kawasan kumuh perkotaan bisa melahirkan kejahatan. Hal ini dikatakan oleh Blumer (1984) dikarenakan status kota sebagai pusat populasi dan perekonomian yang baru berkembang.

Pada studi kriminologi, telaah mengenai kejahatan merupakan topik yang banyak mendapatkan perhatian. Pada hakekatnya

konsep kejahatan adalah konsep yang dirumuskan melalui proses sosial yang bersifat nisbi (relatif) yang berlaku hanya menurut keadaan tertentu saja, misalnya berlaku menurut tempatnya, menurut keadaan aktual pada saat pelaku melakukan perbuatannya, dan akan berbeda dari waktu yang satu ke waktu yang lain (Mustofa, 2010: 30).

Tingginya angka kejahatan di sebuah wilayah, banyaknya jenis kejahatan spesifik yang terjadi di suatu kelompok masyarakat tertentu, merupakan sejumlah fenomena

yang berkembang di sebuah masyarakat. Penjelasan mengenai kejahatan memberikan kontribusi pemahaman mengenai kejahatan baik individual maupun kelompok, mulai dari sebab kejahatan, proses perkembangan kejahatan bahkan terbentuknya kelompok kejahatan di sebuah masyarakat. Seperti *gang* dan *organized crime* (Cloward dan Ohlin 1960, Sutherland, Cressey dan Luckenbill 1992).

Cara beradaptasi yang menyimpang dari nilai dan perilaku konformitas dalam sebuah masyarakat, pada gilirannya menjadi pola perilaku sebagai anggota kebudayaan, bahkan kemudian dianggap sebagai cara yang bisa diterima. Cara beradaptasi yang sedemikian kemudian menjadi nilai-nilai kelompok dalam masyarakat bahkan mendapatkan penguatan (*reinforcement*) dengan beragam bentuk dan cara. Cara beradaptasi akan selalu ada pada masyarakat perkotaan.

Masyarakat kota sendiri di definisikan sebagai masyarakat yang berada di wilayah urban yang memiliki keberagaman populasi etnis dan landasan sosial, subkultur (melalui migrasi), pembagian kerja, faktor penghasilan, kekuasaan, gengsi serta gaya hidup dan nilai oleh Broom dan Szelnik (1968: 437). Lebih lanjut, Broom dan Szelnik (1968) mengatakan bahwa perubahan

dan perkembangan kota tidak luput dari keberadaan konflik, yang pada akhirnya tentu dapat menyebabkan lahirnya wilayah kejahatan pada perkotaan.

Sebagai salah satu kota yang semakin berkembang, Kota Pekanbaru memiliki wilayah dengan tingkat kriminalitas (*crime rate*) yang cukup tinggi. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, memiliki 8 (delapan) kecamatan, dan 45 (empat puluh lima) kelurahan/desa, dengan luas wilayah 632,26 km² (BPS Kota Pekanbaru, 2016: 3). Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pekanbaru tidak pernah lepas dari keberadaan pendatang dan investor dalam menanamkan investasinya. Namun pada sisi lain, hal ini tentunya juga bisa menjadi faktor timbulnya konflik yang berujung pada terjadinya tindakan kejahatan di wilayah perkotaan.

Dari data kejahatan yang tercatat di 8 (delapan) Polsek yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2016, dan membandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah hukum Polsek yang ada. Maka dapat dilihat risiko penduduk Pekanbaru mengalami tindak kejahatan atau menjadi korban beberapa jenis kejahatan yang dihitung pada penelitian ini terlihat pada table berikut:

Tabel 1.2. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Menurut Polisi Sektor Tahun 2016

Polisi Sektor	2016	Jumlah Penduduk*	<i>Crime Rate</i>
Bukit Raya	213	263.724	8,076621
Lima Puluh	46	221.960	2,072443
Pekanbaru Kota	64	27.390	23,36619
Rumbai	90	76.765	11,72415
Rumbai Pesisir	33	75.852	4,350583
Senapelan	102	38.498	26,49513
Sukajadi	122	153.085	7,969441
Tampan	140	208.275	6,721897
Total Keseluruhan	810	1.065.548	7,601723

Sumber : Polsek se-Kota Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru dan Olahan Data Penelitian

*Perkiraan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kota Pekanbaru. Sementara perkiraan pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sekitar 2,6% pertahun

Tabel di atas menunjukkan risiko mengalami tindak kejahatan untuk beberapa tindak kejahatan yang peneliti himpun, guna meminimalisir perbedaan pemaknaan terhadap tindak kriminal, penelitian ini dibatasi pada kejahatan-kejahatan tertentu yaitu: pembunuhan, pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian dengan pemberatan (*curat*), perkosaan. Pemilihan jenis kejahatan ini karena merupakan kejahatan yang paling umum terjadi, dianggap serius, dan menjadi perhatian masyarakat secara umum, bahkan ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*). Penelitian ini tidak membahas kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam *white collar crime* seperti korupsi, pembakaran lahan dan hutan, ataupun *cybercrime*, kejahatan-kejahatan tersebut memiliki karakteristik dan analisis tersendiri.

Risiko mengalami tindak kejahatan tertinggi terjadi pada wilayah hukum Polsek Senapelan, di mana dari tiap 10.000 orang penduduknya, sekitar 26 orang diantaranya mengalami tindak kejahatan. Selanjutnya untuk wilayah hukum Polsek Pekanbaru Kota tiap 10.000 orang penduduknya sekitar 23 orang mengalami tindak kejahatan. Sementara kemungkinan risiko terendah di wilayah hukum Polsek Lima Puluh di mana dari setiap 10.000 orang penduduk, hanya dua orang diantaranya berisiko mengalami tindak kejahatan.

Terlepas dari validitas data yang hanya bersifat dilaporkan oleh masyarakat ataupun aksi kriminalitas yang tertangkap oleh pihak kepolisian, dan di duga masih banyaknya kejadian kriminalitas yang lebih besar dan tidak dilaporkan atau angka gelap (*dark number*) kejahatan berkemungkinan masih relatif besar. Namun data statistik yang ada mampu menjelaskan adanya wilayah-wilayah yang memiliki angka kejahatan yang tinggi di Kota Pekanbaru

Metode Penelitian

Untuk menyusun tulisan yang lengkap tentang wilayah kejahatan di perkotaan (Studi Kota Pekanbaru), maka pendekatan

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan kepada keunggulan pendekatan ini dalam mendapatkan data. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimungkinkan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi terutama mengenai wilayah kejahatan di perkotaan yang mengakibatkan kejahatan tersebut kebal akan adanya penindakan dan berlangsung dari tahun ke tahun.

Penelitian ini bersifat holistik dengan tujuan menginformasikan dan mendeskripsikan pemahaman peneliti atas fenomena sosial budaya (Silverman, 2005).

Dalam teknik pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode semi-etnografi. Studi etnografi ini memiliki ciri unik sebagai teknik pengumpulan data. Jangka waktu penelitian yang relatif lama, berada dalam setting tertentu, wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur serta mengikutsertakan interpretasi penelitiannya. Meskipun dalam beberapa penjelasan dikatakan bahwa interpretasi peneliti menjadi perdebatan dengan penganut positivis. Untuk kasus-kasus tertentu, kemampuan interpretasi peneliti diragukan. Namun tanpa disadari interpretasi ilmuwan-ilmuwan etnografi berperan besar dalam menyajikan kesadaran-kesadaran kritis atas perilaku bermedia masyarakat (Hammersley dan Atkinson, 2007).

Pembahasan

Ketimpangan Struktur

Penjelasan mengenai munculnya wilayah kejahatan di Kota Pekanbaru tidak bisa dilihat sebagai sebuah kemunculan yang tiba-tiba saja terjadi. Kemunculan wilayah kejahatan merupakan suatu proses yang bersifat transformatif dari cara masyarakat yang beradaptasi dengan situasi eksternal yang dihadapinya. Sebagai sebuah wujud adaptasi atas kondisi eksternal dari sosial masyarakat yang diinternalisasi, kejahatan dipandang sebagai cara bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk mencapai tujuan budaya yang telah mengarahkan orientasi hidup pada nilai-nilai yang diakui bersama di

wilayah tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Narasumber pada penelitian ini, kemunculan wilayah kejahatan diyakini berkaitan dengan beragam konstitutif interrelasional berupa situasi ketertinggalan, keinginan untuk mendominasi dan tekanan-tekanan yang muncul dari tujuan budaya masyarakat itu sendiri, yaitu menjadi kaya dari aspek ekonomi. Sementara pada sisi lain, akses yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah kejahatan sangat terbatas untuk mencapai tujuan budaya tersebut. Beragam faktor ini setara dengan apa yang dijelaskan oleh Merton (1957) dalam *Social Theory and Social Structure* sebagai sumber tekanan (*strain*) yang menimbulkan situasi anomie akibat ketidakselarasan antara tujuan budaya yang diterima dan dijadikan orientasi hidup dengan cara-cara legal yang tersedia dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hal tersebut tergambarkan pada wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru. Situasi ketertinggalan masyarakat yang berada di wilayah Kampung Dalam Kota Pekanbaru merupakan sebagai akibat perubahan cepat yang terjadi seiring perkembangan kota dari tahun ke tahun yang telah melahirkan tekanan sedemikian rupa bagi masyarakat ada di wilayah tersebut. Situasi perubahan tersebut, tidak dapat diikuti oleh masyarakat yang tinggal di wilayah ini, karena sumber terbatasnya sumber daya mereka dari segi pendidikan yang mereka miliki, telah melahirkan situasi anomie. Hal tersebut telah menimbulkan pergeseran cara dan tujuan mereka yang semula merantau ke Kota Pekanbaru dengan modal tenaga yang dimiliki berubah dengan mencari cara-cara lain yang sifatnya ilegal atau pelanggaran hukum seperti melakukan kekerasan seperti Ngompas-semacam meminta uang dengan adanya unsur pemaksaan dan kekerasan-, penipuan hingga penyelundupan barang. Pergeseran nilai dan tujuan semacam ini selaras dengan apa yang dikemukakan Deflam dan Mathieu (2007)

yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat merupakan sumber anomie. Situasi ini ditandai dengan melemah dan bahkan tidak berfungsinya regulasi normatif di tengah masyarakat.

Keterbatasan peluang akibat akses yang terbatas dengan daya dukung sumberdaya manusia yang juga rendah telah menempatkan masyarakat yang berada di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru pada posisi ketidakberdayaan. Hal ini bermakna bahwa mereka berada pada posisi struktural yang tidak beruntung. Mengikuti cara pandang Merton (1957), kejahatan dianggap sebagai cara beradaptasi masyarakat pada kondisi anomie yang mereka hadapi. Secara teoritis Merton menyatakan bahwa ketimpangan struktur telah menyebabkan sebagian masyarakat berada pada situasi tidak beruntung karena tidak memiliki akses untuk mencapai tujuan dengan cara yang melembaga, pada gilirannya situasi ini akan diadaptasi dengan berbagai cara.

Masyarakat yang berada di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat yang mendiami Kota Pekanbaru merupakan masyarakat yang suka tidak suka akan dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain yang ada di kota ini. Sumber daya yang terbatas telah menempatkan kedua wilayah ini pada posisi yang dianggap tidak beruntung. Situasi ini begitu terasa dengan banyaknya perantauan yang ada dan mendiami wilayah ini tanpa modal pendidikan dan keterampilan yang baik. Pada akhirnya berimplikasi pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mengandalkan kekuatan otot seperti kuli bangunan, kuli panggul hingga premanisme yang tumbuh semakin banyak beriringan dengan meningkatnya perantauan yang datang di wilayah ini.

Dalam persaingan dengan masyarakat lain di Kota Pekanbaru, masyarakat di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat mengalami ketidakmampuan untuk memperebutkan penguasaan ekonomi karena keterbatasan akses

untuk memperoleh dan memenangkan persaingan. Hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketidakmampuan memperebutkan sumberdaya ekonomi dan menyetarakan posisinya dengan masyarakat lainnya di Kota Pekanbaru dan sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama setara dengan apa yang dikemukakan Merton (1957) bahwa posisi struktural yang timpang dan menempatkan seseorang atau kelompok dalam posisi tidak beruntung akan menimbulkan situasi anomie. Situasi anomie dimaksud adalah adanya ketidakselarasan antara harapan-harapan dan tujuan budaya dengan cara-cara legal yang tersedia dan dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, dalam konteks di dua wilayah ini, situasi anomie yang terjadi bersifat kolektif, yang konsekuensinya tentu akan muncul dalam bentuk respon kolektif pula.

Secara simultan, pada level individual, terjadi situasi yang kurang lebih sama. Posisi sosial ekonomi di dalam masyarakat di dua wilayah ini juga tidak seragam. Walaupun sama-sama mengalami eksklusi sosial yang cukup lama, akan tetapi terdapat sebahagian warga yang jauh lebih beruntung dibandingkan yang lainnya. Realitas semacam ini secara alami telah melahirkan struktur pada masyarakat baik di wilayah Kampung Dalam ataupun Pangeran Hidayat merefleksikan betapa penghargaan terhadap hal-hal yang bersifat material begitu sangat dihargai. Hal ini menciptakan pola hubungan struktural yang menempatkan seseorang ke dalam posisi-posisi berdasarkan ukuran material. Dengan demikian alasan mengapa cara pandang Merton relevan digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadai di kedua wilayah ini.

Menurut para narasumber penelitian, dalam budaya masyarakat yang berada di kedua wilayah ini, ukuran keberhasilan seseorang telah ditentukan secara budaya. Hal ini dapat terlihat dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat dan tersedianya sarana untuk mempresentasikan keberhasilannya secara materi, tuntutan

peran bagi kepala keluarga untuk membiayai keperluan keluarganya dan mengangkat martabat keluarganya. Beragam hal ini merupakan bagian dari tujuan budaya yang ada di dua wilayah ini yang semuanya bermuara pada akumulasi penguasaan materi.

Tuntutan sebagai tujuan budaya yang berlaku sama bagi semua masyarakat tersebut tidaklah diimbangi dengan tersedianya atau terbukanya peluang bagi semua orang. Menurut para pelaku kejahatan dari kedua wilayah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa begitu banyak keinginan yang dituntut oleh cara hidup dalam bermasyarakat, namun tidak bisa mereka penuhi karena mereka berada pada kondisi keluarga yang serba kekurangan. Apa yang dialami oleh para narasumber tidak lain merupakan ketimpangan struktural sebagaimana yang dikemukakan oleh Merton (1957).

Tekanan kesulitan yang diakibatkan rendahnya daya dukung sumberdaya yang telah mendera kehidupan masyarakat di kedua wilayah ini dalam jangka waktu yang lama serta berlatar belakang historis sebagai perantau yang mengalami kesulitan hidup di Kota Pekanbaru telah membuat masyarakat menjadikan keberhasilan mengakumulasi materi sebagai ukuran sukses. Dalam pergaulan sehari-hari masyarakat yang ada, penghargaan diberikan pada orang-orang yang dapat menampilkan kesuksesan melalui simbol-simbol materi.

Banyaknya kenikmatan sosial yang di dapatkan oleh orang-orang yang sukses mengakumulasi materi di Kota Pekanbaru untuk memenuhi harapan-harapan sosial telah menimbulkan kondisi ketidakadilan dan ketimpangan secara struktural. Hubungan struktural yang demikian tentu saja menimbulkan perasaan tidak adil bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan mengakumulasi materi seperti pada masyarakat yang ada di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru. Tekanan sosial budaya yang demikian kuat menimbulkan beragam cara

bagi masyarakat di kedua wilayah untuk menyesuaikan diri. Cara menyesuaikan diri yang dipilih tentu saja ditentukan oleh akses yang tersedia untuk memenuhi harapan-harapan sosial dan tujuan budaya yang telah disepakati dan diterima oleh masyarakat di kedua wilayah ini sebagai kebutuhan umum, seperti melakukan praktik-praktik pelanggaran hukum dengan kekerasan atau peredaran barang terlarang seperti narkoba.

Selaras dengan pemikiran Merton (1957), tipe masyarakat yang dibahas Merton dengan tipe masyarakat di kedua wilayah yakni Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat adalah sama-sama memberikan penghargaan utama kepada keberhasilan mengakumulasi materi sebagai ukuran kesuksesan. Hal inilah yang menjadikan dasar mengapa teori Anomi dapat dijadikan penjelasan tentang kemunculan wilayah kejahatan yang di Kota Pekanbaru. Kekuatan utama Merton (1957) dalam menjelaskan kejahatan pada masyarakat kapitalis adalah menemukan argumentasi empirik tentang ketimpangan struktural yang menyebabkan ketidakseimbangan antara tujuan budaya dengan cara mencapai tujuan tersebut. masyarakat yang ada di kedua wilayah yang menjadi obyek penelitian, walaupun bukan masyarakat kapitalis, namun mengalami hal yang setara dengan yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Situasi ini bersumber pada orientasi materi yang menjadi dasar mengukur keberhasilan sebagai tujuan budaya

Keterbatasan Akses Masyarakat di Kedua Wilayah Untuk Meraih Sukses

Melihat kemunculan kejahatan pada wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah kejahatan untuk jalan hidup dapat dilakukan melalui latar belakang akses yang dimiliki oleh para pelaku dalam meraih tujuan budaya yang ingin dicapainya. Pada penjelasan sebelumnya, ketimpangan struktural yang menempatkan masyarakat pada wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat pada posisi terpinggirkan,

telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya. Sementara itu pada level individu, di dalam kedua wilayah tersebut, orang-orang yang tidak beruntung yang tidak bisa menampilkan dirinya dalam pandangan kesuksesan materi, bagi kalangan ini kenikmatan sosial tidak bisa dirasakan jika ia tidak mampu merepresentasikan simbol-simbol kesuksesan.

Setara dengan pandangan Merton (1957), ketimpangan struktural selalu diikuti dengan keterbatasan bahkan tertutupnya akses bagi sebagian orang yang berada pada struktur yang tidak beruntung untuk menggunakan cara-cara yang melembaga dalam mencapai tujuan atau meraih harapan-harapan sosial yang telah didefinisikan bersama. Pada masyarakat di kedua wilayah ini, dalam interaksinya dengan masyarakat di Kota Pekanbaru pada umumnya, keterbatasan akses ditandai dengan rendahnya daya dukung sumberdaya yang dimiliki individu yang berakibat pada ketertinggalan perkembangan sosial ekonomi dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Keterbatasan akses ini juga mengakibatkan pada ketidakmampuan masyarakat di kedua wilayah untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi yang ada di Kota Pekanbaru secara legal. Pendidikan yang baik, modal keterampilan dalam bidang tertentu atau berwirausaha merupakan sumberdaya ekonomi yang menjanjikan keuntungan yang besar di Kota Pekanbaru. Akan tetapi, untuk memperoleh manfaat dari sumber ekonomi tersebut dibutuhkan kemampuan modal yang tidak sedikit. Kebanyakan masyarakat di wilayah ini justru tidak memiliki modal tersebut.

Diakui oleh narasumber penelitian bahwa dari segi fisik, rumah-rumah di wilayah Kampung Dalam tidak berbeda secara signifikan dengan satu sama lainnya. Sementara perkembangan di luar wilayah ini di Kota Pekanbaru justru menunjukkan perkembangan dinamika perubahan fisik

yang demikian pesat. Tampilan lingkungan fisik, terutama rumah-rumah warga mengalami perubahan menuju bentuk-bentuk perumahan yang mengikuti konsep kekinian. Sementara perubahan semacam ini dianggap sebagai arah orientasi, masyarakat di kedua wilayah ini tidak berdaya untuk melakukan hal tersebut. tingkat ekonomi yang rendah, sumberdaya yang tidak mendukung telah menjadi kendala untuk mencapai tujuan semacam ini.

Pada level individu, penerimaan terhadap tujuan budaya tentang mendefinisikan sukses secara budaya tekah menjadi orientasi hidup serta cara mengukur keberhasilan orang pada kedua wilayah ini. Hal ini tentu saja menjadi sumber ketegangan secara sosial bagi masyarakat di kedua wilayah ini yang tidak memiliki akses untuk meraih dan merealisasikan tujuan dan ukuran kesuksesan yang telah ditetapkan secara budaya tadi. Begitu banyaknya orang yang dicirikan keberhasilan secara materi yang hanya dapat dimanifestasikan melalui materi, menyebabkan banyak individu di kedua wilayah ini berada pada situasi ketegangan sosial. ketegangan sosial ini bersumber dari harapan-harapan sosial yang melingkupi seseorang akan tetapi tidak dibarengi dengan kelengkapan akses untuk mencapai harapan-harapan sosial tadi ke dalam kenyataan hidup yang dapat ditampilkan pada arena-arena sosial budaya.

Setara dengan apa yang dikemukakan Merton (1957) dalam masyarakat yang telah menetapkan tujuan dan makna tentang sukses secara budaya, kebudayaan juga telah menentukan cara-cara yang secara sosial dapat diterima (*socially accptable ways*) dalam mencapai tujuan budaya yang telah disepakati. Tujuan budaya dan cara yang dapat diterima untuk mencapai tujuan tersebut. struktru justru membedakan kesempatan dan akses yang tersedia bagi warga masyarakat untuk menggunakan cara-cara yang melembaga dalam meraih dan meralisasikan tujuan budaya tadi. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat di kedua wilayah penelitian. Orang yang ada di wilayah

Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat akan dinilai dengan ukuran yang sama tentang kesuksesan. Cara-cara yang diterima untuk meraih tujuan tadi berlaku untuk semua warga. Akan tetapi, struktur sosial di mana seseorang berada justru memberikan peluang dan akses yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam pandangan Merton (1957) banyak nafsu alami individu sebenarnya tidaklah alamiah. Hasrat individu untuk meraih sukses dan mengumpulkan sebanyak mungkin simbol kesuksesan agar dapat menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial bukanlah sesuatu yan alamiah. Hal ini muncul dari tawaran-tawaram budaya yng memberikan ruang secara khusus yang dilengkapi dengan segala kehormatannya bagi orang-orang yang dapat memenuhi kriteria keberhasilan. Hasrat yang muncul dari masyarakat yang berada di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat sepenuhnya bersumber dari apa yang ditawarkan oleh budaya masyarakat dalam meraih sukses yang ada di Kota Pekanbaru yang notabene sebagai kota rantauan. Begitu banyaknya arena yang secara budaya menjadi wadah bagi individu yang ada di Kota Pekanbaru untuk menampilkan kesuksesannya telah melahirkan hasrat sosial bagi masyarakat yang ada di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat untuk mencapainya. Pada sisi lain, peluang untuk meraih hasrat itu itu tidaklah berlaku dan tersedia secara sama untuk semua orang. Banyak warga masyarakat yang berada di kedua wilayah tersebut berada pada struktur yang tidak beruntung, yang tidak menyediakan peluang untuk meraih sukses tadi dengan cara-cara yang melembaga.

Struktur sosial yang ada di masyarakat Kota Pekanbaru tidaklah tersusun dalam lapisan yang ketat. Maksudnya, mobilisasi sosial sangat mungkin terjadi sepanjang ukuran-ukuran yang menjadi dasar menempatkan seseorang pada lapisan tertentu dapat terpenuhi. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Pekanbaru yang sangat heterogen.

Tidak ada sekelompok etnis tertentu yang menguasai atau mendikte jalannya sosial kemasyarakatan yang ada di kota ini. Maka ukuran yang dominan dalam menentukan posisi sosial seseorang adalah ukuran materi. Hal ini dapat dilihat banyaknya keistimewaan sosial yang dapat dinikmati masyarakat Kota Pekanbaru jika mampu mengakumulasi materi.

Sedangkan orang-orang yang berada pada struktur yang tidak beruntung, biasanya adalah orang-orang yang masuk dalam kategori tidak punya, tidak memiliki peluang untuk memuaskan hasrat sosial yang ditawarkan secara budaya. Pada situasi semacam ini, Merton (1957) menyebutkan bahwa struktur sosial dapat membatasi kemampuan kelompok sosial tertentu, terutamanya yang tidak mempunyai untuk memuaskan hasratnya. Hal ini bermakna bahwa struktur sosial itu sendiri secara pasti memaksa kelompok tidak mempunyai tadi untuk terlibat dalam tingkah laku yang tidak selaras dengan norma-norma dalam mencapai tujuan (non-konformitas). Situasi semacam ini akan menjadi penjelasan kemunculan wilayah kejahatan dan perilaku jahat sebagai jalan hidup dalam pemenuhan hasrat sosial individu di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat.

Kejahatan Sebagai Cara Beradaptasi

Ketimpangan struktural yang dirasakan masyarakat yang tinggal pada wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru menempatkan mereka pada posisi yang tidak beruntung, terpinggirkan dan bahkan mengalami eksklusi sosial yang berlangsung lama, telah menyebabkan ketertinggalan di bandingkan masyarakat di wilayah lain yang ada di Kota Pekanbaru secara umum. Kondisi ini telah menimbulkan kasadaran bagi masyarakat yang berada di kedua wilayah ini tentang keterbatasan yang mereka miliki. Pada tingkat individual, ketegangan sosial muncul akibat tekanan budaya akan tujuan-tujuan dan ukuran sukses yang mungkin dicapai melalui penguasaan materi. Banyaknya arena budaya yang

mengharuskan seseorang menampilkan kesuksesannya namun cara untuk meraih kesuksesan tidak tersedia secara sama, telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap cara-cara yang melembaga dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan budaya, muncul cara beradaptasi yang khas, setelah terlebih dahulu terjadi internalisasi terhadap kondisi eksternal semacam ini.

Kondisi keterbatasan sumberdaya yang dimiliki individu menimbulkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh individu yang berada di kedua wilayah ini dapat dipandang sebagai rendahnya peluang untuk mencapai tujuan perkembangan masyarakat pada saat membandingkan dengan masyarakat lain yang ada di Kota Pekanbaru. Beragam cara dilakukan untuk mengatasi kesulitan ini dan demi mendapatkan akses untuk mencapai tujuan agar sejajar dengan masyarakat lainnya.

Berdagang merupakan salah satu cara bagi masyarakat di kedua wilayah ini untuk mencapai tujuan budaya, namun pada kenyataannya cara ini masih dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan yang cukup tinggi bagi masyarakat yang tinggal di pusat kota. Hal ini membuat banyak individu yang berada di wilayah ini mencari cara-cara yang dianggap melanggar hukum namun mampu menjamin pemenuhan kehidupan mereka.

Ketidakmampuan menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan budaya dengan cara-cara yang melembaga seperti berdagang dalam mencapai tujuan tersebut membuat pelanggaran hukum dianggap sebagai cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan budaya tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Merton (1957) bahwa sepanjang muncul ketidakpuasan terhadap cara yang tersedia untuk mencapai tujuan, maka akan terjadi beragam penyesuaian (*adjustment*) terhadap situasi ini. Penyesuaian yang dimaksud terjadi akibat konflik mental yang dialami pada saat ada kewajiban untuk mengikuti cara yang melembaga dalam mencapai tujuan dengan tekanan untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah (*illegitimate means*)

dalam mencapai tujuan yang tetap disetujui.

Tidak terpeliharanya keseimbangan antara tujuan budaya dengan cara yang melembaga dalam mencapai tujuan tadi telah menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap cara-cara yang melembaga seperti berdagang. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat yang juga dinamis. Kondisi ini muncul karena terjadinya perubahan makna dan ukuran tentang kesuksesan yang menjadi tujuan budaya. Perubahan tentang makna dan ukuran kesuksesan tadi kuat dipengaruhi oleh internalisasi, baik internal maupun eksternal yang terjadi di sekelilingnya.

Melakukan kejahatan sebagai sebuah entitas merupakan alternative untuk memuaskan hasrat meraih tujuan budaya. Kejahatan merupakan proses antara internalisasi realitas yang dihadapi masyarakat yang ada di wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat dengan eksternalisasi yang mereka lakukan sebagai upaya mengadaptasi ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam teori Anomi yang disampaikan oleh Merton (1957) bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang berada di wilayah ini merupakan ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan peluang menggunakan cara yang melembaga dalam mencapai tujuan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk dari model adaptasi *Innovation*. Kejahatan dapat dipahami bentuk adaptasi atas ketidaktersediaan akses untuk meraih hal-hal yang bersifat ekonomi maupun hal-hal yang bernilai lainnya yang merupakan simbol kesuksesan.

Penutup

Pemilihan cara memenuhi tujuan hidup dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran untuk mencapai tujuan budaya yaitu sukses secara ekonomi adalah karena rendahnya dukungan sumberdaya baik manusia maupun alam yang ada di ke

dua wilayah kejahatan yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu wilayah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat.

Kondisi yang semacam ini menyebabkan materi menjadi ukuran kesuksesan dalam masyarakat di wilayah ini. Namun pada saat yang sama peluang untuk meraih tujuan sukses justru sangat terbatas. Berdekatan dengan pasar tradisional yang ada di kedua wilayah dan berprofesi sebagai pedagang tidak lagi mampu memuaskan hasrat untuk mendapatkan materi yang diinginkan. Situasi yang terus berubah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara tujuan budaya dan cara untuk mencapai tujuan. Maka kejahatan dianggap sebagai cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan budaya.

Kejahatan bukanlah sekedar jalan untuk memuaskan hasrat-hasrat yang bersifat material. Dalam praktik kejahatan juga tersembunyi motivasi untuk memuaskan hasrat immaterial berupa keinginan mendapatkan rasa hormat dan ditakuti oleh orang-orang dilingkungannya. Sukses secara materi di masyarakat dianggap sebagai sebuah kehormatan, walaupun masyarakat di kedua wilayah kejahatan ini bukanlah masyarakat kapitalis seperti yang dijelaskan oleh Merton (1957), namun orientasi materi sebagai ukuran kesuksesan telah menyebabkan terjadinya anomi pada saat tidak adanya kesimbangan antara tujuan dan cara melembaga untuk mencapai tujuan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan sebagai cara beradaptasi masyarakat di kedua wilayah setara dengan cara beradaptasi *innovation* yang dikemukakan Merton.

Meskipun tidak dapat di samaratakan bahwa seluruh masyarakat yang berada di kedua wilayah ini adalah pelaku kejahatan atau mendukung aksi kejahatan, namun mereka dapat menerima keberadaan pelaku kejahatan maupun kejahatan itu sendiri yang berada di wilayah ini. Pemberitaan media maupun kasus-kasus kejahatan yang berasal dari kedua wilayah ini di Kota Pekanbaru justru memberikan penegasan

bahwa identitas wilayah dan kejahatan di kedua wilayah ini semakin dikenal. Hal ini pada dasarnya menyebabkan *moral panic*

yang dialami oleh masyarakat yang berasal dari wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumer, M. 1984. The Chicago School of Sociology: Institutionalization, diversity, and rise of sociological research. Chicago: University of Chicago Press.
- BPS Kota Pekanbaru. 2016. Kota Pekanbaru Dalam Angka; Pekanbaru Municipality In Figures 2016. BPS Kota Pekanbaru: CV. Amelia Tiga Dua
- Broom, Leonard and Philip Szelnick. 1968. Sociology; A Text With Adapter Readings. New York: Harper & Row
- Cloward, Richard dan Lyold, Ohlin. 1961. Delinquency and Opportunity. Glencoe IL: Free Press.
- Deflem, Mathieu, 2007, Anomie. In Ritzer, George (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing, page 144-145
- Hammersley, M., & Atkinson, P. 2007. Ethnography: Principles In Practice (edisi ke-3). London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group
- Merton, Robert K, 1957, Social Theory and Social Structure, revised edition. Glencoe, IL: Free Press.
- Mustofa, Muhammad. 2010. Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan pelanggaran Hukum edisi kedua. Bekasi: Sari Ilmu Pratama (SIP)
- Silverman, D. 2005. Doing Qualitatif Research: A Practical Handbook (edisi ke-2). London: Sage.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., dan Luckenbill, D. E. 1992. Principles of criminology. Dix Hills, NY. General Hall.